

ISBN: 978-602-73574-3-3

PROCEEDING

INTERNATIONAL SEMINAR ON DISASTER

“STRATEGY FOR BUILDING URBAN RESILIENCE THROUGH
DISASTER RISK MANAGEMENT (DRM)
AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION (CCA)”



25TH – 26TH AUGUST, 2015



Presented by :

Faculty of Social & Politic Science and Faculty of Law
Wijaya Kusuma Surabaya University

Supported by:

National Authority for Disaster Management



Published by:

Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP)

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp.: 031-5877577

E-mail: pphp.fhuwks@gmail.com

Editor:

Ari Purwadi, Ahmad Basuki, Astrid Damayanti
Abdus Sair, Ria Tri Vinata

INTERNATIONAL SEMINAR ON DISASTER

"Strategy for Building Urban Resilience Through Disaster Risk Management (DRM) and Climate Change Adaptation (CCA)"

INTERNASIONAL SEMINAR ON DISASTER: "Strategy for Building Urban Resilience Through Disaster Risk Management (DRM) and Climate Change Adaptation (CCA)"

Editor: Ari Purwadi, Ahmad Basuki, Astrid Damayanti,
Abdus Sair, Ria Tri Vinata

© 2015

Tata Letak: Perspektifhuwks

ISBN: 978-602-73574-3-3

Penerbit:

Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP)
Fakultas Hukum – Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225
Telp.: 031-5677577, 5689738
Fax. : 031-5679791
E-mail: pphp.fhuwks@gmail.com

TABLE OF CONTENT

Cover — *i*

Foreword — *iii*

Table of Content — *v*

1. Model Intervensi Pengelolaan Sungai (*Community Based Action Research* Pada Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Bedadung Kabupaten Jember)
Atik Rahmawati, Budhy Santoso, Kris Hendrijanto — 1
2. *Composite Beams of Concrete – Mortar of Coconut Timber Particles with Varians Thickness and Shear Connectors*
Shyama Maricar, Nirmalawati, Agus Rivani — 17
3. Pengembangan Bahan Pembelajaran Pendidikan Antisipasi Bencana Banjir Bandang untuk PAUD (*Flash Flood Anticipation Design Material for Early Childhood Education*)
Wahju Dyah Laksmi Wardhani — 27
4. *Campus Community Empowerment in The Fire Disaster Management in Urban Areas*
Agus Purwito, Johan Paing — 41
5. Pemanfaatan Kayu Berkualitas Rendah (*Lannea Coromandelica*) sebagai Balok Struktural Bangunan (Kajian Karakteristik Model Balok Solid)
Hajatni Hasan, Andi Arham Adam, Harun Mallisa — 51
6. Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada Konsep Bencana Sosial
Vieta Imelda Cornelis — 63
7. Kemitraan Stakeholder dalam Penanganan Pengungsi (Studi Pada Penanganan Erupsi Gunung Kelud)
Mochammad Rozikin — 81
8. Mitigasi Bencana Berbasis Pemolisian Masyarakat
Siti Marwiyah — 97

9. *Resilience of Adolescence Disaster Survivor Who Affected Pyroclastic Fall From Kelud Volcano Eruption in Kediri Regency*
Fajar Ruddin, Rahmat Hidayat, Dina Ruslanjari — 107
10. *To Prevent Political and Social Disasters Caused by Nature Indecisive of Indonesian People*
Bambang Suprijadi — 127
11. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan*
Umi Enggarsasi — 147
12. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penanggulangan Bencana*
Titik Suharti — 159
13. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjarahan pada Saat Bencana*
Nur Khalimatus Sa'diyah — 175
14. *Kajian Hukum dan Kebijakan Publik: Pengendalian Pencemaran Udara di Perkotaan*
Ari Purwadi — 187
15. *Strategi Membangun Kota Tangguh Bencana Melalui Program Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas di Kota Surabaya*
Abdus Sair — 199
16. *Status Perubahan Konfigurasi Kepulauan Negara Republik Indonesia Akibat Perubahan Iklim*
Ria Tri Vinata — 221
17. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Malang)*
M. Lukman Hakim, Ahmad Imron Rozuli, Ratri Nurwanti — 237

STRATEGI MEMBANGUN KOTA TANGGUH BENCANA MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA SURABAYA

Abdus Sair

*Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)*

E-mail: abdussyair@yahoo.com

ABSTRACT

The study about safe the environment by empowering the societies is an interesting thing. It is about the environment degradation in cities. Problems about garbage, flood and air pollution are problems that cause the environment degradation. Until these times there are many parties that have been trying to safe the environment degradation through some ways, like garbage management, society development program, and so on. But all those ways still can't handle over the problems seriously because of the low emancipation values. Because of it, this writing will analyze how Surabaya city improve itself to be a city that understand about the disaster and know how to handle over it through garbage management program which is run in a community. This program is held by reforming the environment which is done through garbage management that is run in a community. This program become a strategy to improve the city that is not only understand about disaster but also know how to handle over it because it has a specialty in it; first, organization that prioritize the community and gender, second, a built principle, third, corporation with the government, civil society and private sector.

Keyword: *Green and Clean Program, Strategy for Building Urban Resilience, Organize, Principle, Partnership.*

PENDAHULUAN

Persoalan serius yang perlu ditangani pemerintah dan sangat membutuhkan peran masyarakat adalah masalah lingkungan, terutama di daerah perkotaan. Perkara ini tak hanya mengganggu, namun juga telah mengancam kehidupan umat manusia. Krisis lingkungan seperti udara kotor, langkanya

air bersih, banjir bandang, tanah longsor, dan tingginya suhu ekstrim adalah sederet ancaman¹ yang membuat masyarakat kota dalam kondisi bahaya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pernah mengungkapkan bahwa ancaman itu semakin serius karena setiap tahun kerusakan lingkungan kota di Indonesia semakin meningkat. Tahun 2008 telah mencapai lebih dari 77 juta hektar yang terdiri dari 6,9 juta hektar berstatus sangat kritis, 23,1 juta hektar kritis, dan 47,6 juta hektar agak kritis.² Kerusakan lingkungan itu bukan karena kondisi alam saat ini, melainkan juga karena ulah manusia (banyak pihak), mulai dari kebijakan pemerintah, kelompok swasta dan masyarakat sendiri.

Kebijakan pemerintah soal kota yang bias terhadap sistem ekonomi liberal, adalah contoh yang dianggap berkontribusi terhadap krisis lingkungan di atas. Kebijakan tersebut dinilai pro "investasi" dibandingkan dengan pro lingkungan. Efek dari kebijakan itu adalah kota menjadi sibuk dengan aktivitas masyarakat yang kurang bersinergi dengan lingkungan. Sehingga akibatnya adalah segala macam persoalan menumpuk di kota, mulai dari kemacetan, polusi udara, kampung kumuh (*slum*), banjir, hingga persoalan sampah.

Hingga saat ini banyak pihak telah berusaha untuk merespon keadaan tersebut, dengan melakukan aksi dan gerakan sosial, baik dari masyarakat, aktivis sosial, perusahaan swasta hingga pemerintah sendiri. Aksi dan gerakan sosial itu banyak dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat terhadap lingkungan. Demikian juga dengan pemerintah, segala macam program dilakukan dengan menekankan pada pengurangan resiko bencana lingkungan, meskipun hal tersebut masih terkesan parsial, karena belum mampu menjawab akar masalah lingkungan secara mendalam.

Kota Surabaya sebagai kota paling besar nomor dua setelah Jakarta juga melakukan hal yang sama. Gerakan sosial dan program pengelolaan

¹ Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 1 Tahun 2012, yang dimaksud Ancaman adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan aset atau kehancuran lingkungan hidup. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya.

² www.news.bisnis.com. *Kerusakan Lingkungan Kota di Indonesia Makin Parah*, 21 September 2011, diakses pada tanggal 15 April 2014.

sampah dilakukan dengan memfokuskan pada edukasi masyarakat dalam menangani sampah secara mandiri, seperti; pemilahan sampah, *composting* dan pendaaur-ulangan demi mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program ini dimulai ± 13 tahun yang lalu di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. Konsep yang digunakan adalah Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas. Hasilnya program tersebut dinilai mampu mengurangi volume sampah, yang sebelumnya dianggap tinggi. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga kian baik, yang ditunjukkan dengan hasil survey pada wilayah binaan pengelolaan sampah dan wilayah kontrol.³ Selain itu, program ini juga dianggap mampu menciptakan komunitas ibu-ibu dalam memanfaatkan sampah dalam berbagai macam produk sehingga membantu dalam meningkatkan ekonomi warga.

Tak hanya di Surabaya, gerakan yang sama juga dilakukan di kota-kota lain di Jawa Timur, seperti Kota Malang. Aksi dan gerakan sosial sebagai wujud penyelamatan lingkungan juga dilakukan yang diorganisir oleh masyarakat secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat menjadi *roh* gerakan ini yang ditunjukkan dengan sebuah program yakni “Bank Sampah”. Program ini ingin merubah pola hidup masyarakat menjadi sehat, sekaligus juga untuk menciptakan *manegement* lingkungan yang bersih dan baik. Melalui program ini, masyarakat dibina, didampingi dan dilatih bagaimana mengelola sampah dari hulu sampai hilir. Semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat dikuatkan dengan program yang dikenal dengan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).⁴ Kini, program tersebut dianggap menjadi contoh dan rujukan bagi komunitas lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga forum bank sampah semakin luas dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak swasta juga semakin tinggi.

Beberapa aksi dan gerakan sosial di atas merupakan contoh riil bagaimana usaha masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan. Namun demikian, aksi, gerakan sosial dan program di atas belum mendapatkan porsi yang banyak dalam kajian ilmiah, terutama tentang bagaimana usaha kota dalam membangun dirinya sebagai institusi yang tangguh bencana. Karena itu, tulisan ini akan menjelaskan usaha Kota Surabaya melalui program pengelolaan sampah

³ Hasil studi mengenai “Persepsi dan Perilaku Warga Kota Surabaya terhadap Penanganan Sampah Tahun 2006” oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

⁴ www.banksampahmalang.com, diakses pada tanggal 1 September 2015.

mandiri yang berbasis komunitas, sebagai bentuk strategi membangun kota tangguh bencana. Tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian; *Pertama*, Lingkungan dan manusia; *Kedua*, Pentingnya pemberdayaan masyarakat; *Ketiga*, Pengelolaan sampah berbasis komunitas di Surabaya; dan *Keempat*, Strategi Kota Surabaya membangun Kelurahan tangguh bencana.

PEMBAHASAN

Lingkungan dan Manusia

Lingkungan adalah kesatuan antara kondisi fisik yang mencakup semua sumber daya alam dengan segala kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan untuk menggunakan lingkungan fisik di atas. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan diartikan sebagai sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵ Lebih jauh lingkungan juga diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk didalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada disekitarnya.⁶

Pengertian di atas menyiratkan bahwa lingkungan dan manusia bukanlah entitas yang terpisah. Keduanya saling membutuhkan untuk melangsungkan hidupnya. Lingkungan tidak akan mampu dikelola tanpa manusia, demikian juga sebaliknya manusia tidak akan mampu hidup tanpa ada lingkungan. Pandangan yang menyebutkan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, sementara alam semesta hanyalah alat pemuas manusia adalah pandangan keliru.⁷ Cara pandang ini bisa akan melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif sebagaimana yang kita lihat belakangan ini.

Kerusakan lingkungan adalah contoh paling mutakhir dari cara pandang di atas, sebab manusia telah menempatkan dirinya sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Sehingga bisa dikatakan bahwa krisis

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Cara pandang ini dikenal dengan antroposentrisme.

lingkungan hari ini bukanlah karena kondisi alam semata, melainkan karena ulah manusia yang menempatkan dirinya berada di luar, di atas, dan terpisah dengan alam.

Karena itu, meminimalisir (menyelamatkan) kerusakan lingkungan adalah dengan merubah cara pandang di atas, dengan menempatkan manusia tak hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga sebagai makhluk biologis dan makhluk ekologis. Cara pandang ini penting karena manusia tidak akan bisa berkembang tanpa alam dan lingkungan atau makhluk lainnya. Manusia juga tidak akan bisa hidup karena mereka hanya merupakan salah satu entitas dari alam semesta atau lingkungan. Singkatnya cara pandang ini perlu ditumbuhkan agar manusia tak lagi mengskploitasi lingkungan hanya untuk kepuasan diri, melainkan menjadi penjaga dan perawat lingkungan yang arif dan bijaksana,⁸ tentu dengan aksi yang nyata melalui pemahaman dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*)

Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan baru dalam upaya menyelamatkan lingkungan. Pendekatan ini penting karena ada perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana lingkungan, yang implementasinya dirujuk dari hasil deklarasi *Hyogo Framework for Action* (HFA) 2009, 2005, yaitu: (1) memastikan bahwa pengurangan resiko bencana lingkungan merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, (2) mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor resiko bencana dan meningkatkan peringatan dini, (3) menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketangguhan di semua tingkatan, (4) mengurangi faktor-faktor yang mendasar, (5) memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana lingkungan untuk respon yang efektif.⁹

Secara sosiologis, pendekatan ini dianggap urgen sebagai metode perubahan sosial yang terencana untuk mengatasi masalah pada tingkat komunitas. Apalagi pendekatan ini tidak banyak diterapkan pada konteks penanggulangan

⁸ Pandangan ini dikenal dengan biosentrisme dan ekosentrisme.

⁹ Ebasonline.blogdetik.com. Edi Basuki. *Pengembangan Masyarakat Sadar Bencana*. diakses pada 24 Januari 2014.

bencana lingkungan. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa pendekatan ini penting dilakukan, yakni karena masyarakatlah yang menjadi korban atas bencana lingkungan tersebut, dan mereka pulalah yang umumnya paling awal harus melakukan sesuatu pasca bencana lingkungan itu. Karena itu pemberdayaan masyarakat dianggap perlu untuk mengembangkan masyarakat agar memiliki kemampuan penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan untuk mengurangi resiko bencana lingkungan, yang pada akhirnya masyarakat diharapkan memiliki cara mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana tersebut.

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat ini adalah kemauan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Memberdayakan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Kartasasmita merupakan upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat guna bersama-sama berbuat dan beraksi demi lingkungan.

Pada aras pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat juga disebut sebagai konsep pembangunan, utamanya karena ide partisipasi bersama yang disinergikan dengan upaya-upaya pemerintah untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sasaran dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk menguatkan kapasitas dan pengembangan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segenap aspek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.¹¹

Asumsi yang mendasari pemberdayaan masyarakat ini adalah karena masyarakat merupakan subyek yang dapat berfikir dan berperilaku secara rasional. Masyarakat juga memiliki pengetahuan dan sikap sendiri (*indigenous knowledge*) di dalam lingkungan sosial yang diperoleh melalui proses belajar mengajar secara terus menerus. Pengetahuan dan sikap masyarakat tersebut dianggap lebih "canggih" dibandingkan dengan mereka yang memiliki *expert* di bidang lingkungan sekalipun. Sebagai contoh, di beberapa wilayah di negeri

¹⁰ Anwar, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan)*, h. 1.

¹¹ Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. *Executive Summary: Kajian tentang Model Community Development di Daerah*. 2010, h. i.

ini, ada banyak kelompok masyarakat yang mampu menghadapi bencana lingkungan karena mereka memiliki *survival strategy*-nya sendiri, seperti kearifan lokal masyarakat Kunto Sulawesi, masyarakat Dayak di Propinsi Kalimantan, dan masyarakat asli Jakun di Tasik Chini, Malaysia. Kenyataan ini juga selaras dengan apa yang dilakukan Briand Ward (*mantan Direktur Asian Disaster Preparednes Center*) yang mengapresiasi keunggulan petani Bangladesh. Bukan hanya karena mereka mampu memahami betapa rentannya menghadapi bencana lingkungan, melainkan juga karena mereka mampu mengatur strategi merespon bencana. Bahkan Briand berani mengatakan bahwa petani di Bangladesh memiliki pengetahuan lima belas tahun lebih maju dibanding seorang Ph.D.¹²

Pertanyaannya kemudian, kenapa harus pada tingkat masyarakat? Karena pada tingkat itulah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan dianggap dapat dilakukan melalui *threatment* perubahan sosial. Pada tingkat itu pula masyarakat juga dianggap bisa dikembangkan karena memiliki apa yang disebut dengan sentimen komunitas (*sentiment community*), yakni perasaan yang muncul di antara anggota masyarakat bahwa mereka saling memerlukan,¹³ saling membutuhkan untuk bekerjasama mengatasi krisis lingkungan. Unsur-unsur perasaan komunitas¹⁴ tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, seperasaan, unsur ini muncul karena setiap orang dalam masyarakat berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dalam kelompok masyarakat, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai “kelompok kami”, “perasaan kami”, dan sebagainya. Perasaan demikian muncul terutama karena mereka memiliki kepentingan yang sama di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. *Kedua*, sepenanggungan, unsur ini karena setiap orang sadar akan peranannya dalam kelompok tertentu, dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan peranannya dalam kelompok

¹² John Twigg, *Disaster Risk Reduction: Mitigation in the Development and Emergencies Programming*, London: Humanitarian Practice Network ODI, 2004, h. 131-135, dalam Zainuddin Maliki. *Pengembangan Kesadaran Resiko Bencana bagi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV*. Makalah tanpa tahun, *Op.Cit.*, h. 6.

¹³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1995, h. 163.

¹⁴ R.M. Mac Iver and Charles H., hal. 293, dalam Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, 1995, *Ibid.*, h. 164.

dapat dijalankan, sehingga mereka mempunyai kedudukan yang pasti. *Ketiga*, saling memerlukan, unsur ini muncul karena setiap orang yang menjadi bagian dari masyarakat merasakan dirinya tergantung pada komunitas, yang meliputi kebutuhan fisik, maupun kebutuhan psikologis.

Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Surabaya

Sebagaimana disinggung di atas bahwa, pertumbuhan kota yang kian kompleks menjadi penyebab munculnya masalah lingkungan. Salah satu contohnya adalah jumlah penduduk yang sangat tinggi. Jumlah penduduk telah menjadi ancaman terbesar bagi lingkungan hidup di perkotaan. Mereka tak hanya butuh energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup, namun juga menghasilkan limbah rumah tangga yang banyak. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi juga telah melampaui kemampuan daya dukung lingkungan untuk meregenerasi sendiri, sehingga berdampak pada kualitas hidup manusia di perkotaan.

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar nomor dua setelah Jakarta memiliki masalah yang komplis soal lingkungan ini. Kota ini dihadapkan pada krisis lingkungan akibat jumlah penduduk yang sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Kota Surabaya telah mencapai 2.765.487 penduduk. Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan kemajuan Surabaya sebagai kota kerja¹⁵ dan industri. Disamping masalah populasi dan *building density* yang tinggi, masalah lain yang dihadapi Surabaya adalah soal sampah. Sampah telah menjadi persoalan serius karena sebagian besar jumlah penduduknya masih memiliki kebiasaan buruk dalam membuang sampah, seperti di badan sungai, di jalan, dan tempat-tempat terbuka lainnya.

Sebagai contoh, sampah yang dibuang di sungai telah menyebabkan sungai di Surabaya tak berfungsi dengan baik. Fungsi transportasi, konservasi dan rekreasi yang semestinya ada di sungai, berubah menjadi fungsi tunggal yakni tempat "pembuangan sampah". Air menjadi tidak mengalir, ekosistem menjadi rusak. Inilah sebabnya Kota Surabaya dinilai memiliki lingkungan yang kurang baik. Belum lagi timbunan sampah yang dibuang di sudut kota telah menjadi pemicu timbulnya penyakit, terutama yang disebabkan oleh

¹⁵ Dick, H.W., 2002, *Surabaya, City of Work*.

lalat, tikus, dan nyamuk. Karena itu, muncul indikasi bahwa kian panasnya di wilayah Surabaya tak hanya diproduksi CO₂ yang berlebihan, melainkan juga disebabkan zat CH₄ yang dihasilkan dari pembakaran sampah.¹⁶

Barangkali atas dasar itu, sekitar tahun 2001, Pemerintah Kota Surabaya bersama pihak swasta melakukan gerakan sosial menyelamatkan lingkungan, terutama soal pemecahan masalah sampah. Mereka bersama-sama melakukan tindakan yang diinisiasi oleh korporasi besar Unilever yang operasinya ada di Kota Surabaya. Mereka kampanye soal lingkungan dengan tema “*Surabaya Green and Clean*”. Tujuan kampanye ini adalah mengajak masyarakat agar mampu mengelola sampah dengan baik, yang diintegrasikan dengan program bank sampah. Program ini adalah sebuah sistem pengelolaan sampah yang dilakukan secara kolektif dengan prinsip daur ulang.

Surabaya Green and Clean kemudian menjadi program tahunan pemerintah Kota Surabaya yang dimulai di Kelurahan Jambangan, Surabaya pada tahun 2001. Program ini dianggap berhasil, sehingga pada kurun waktu 2005 hingga 2009, dilakukan replikasi program dengan pendekatan model kompetisi lingkungan antar wilayah. Hasilnya, program *Green and Clean* telah terbentuk di seluruh Kelurahan (171 Kelurahan) dan seluruh Kecamatan (31 kecamatan). Berbagai pihak ikut serta dalam program ini, mulai Pemerintah Kota Surabaya, Yayasan Unilever Indonesia, Jawa Pos, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti, Bangun Pertiwi, Sahabat Lingkungan, Yayasan BLTKI, Pusdakota, Bina Mandiri, dan Madani. Sehingga pada tahun 2007, dilakukan *launching* sekaligus dibentuk sistem fasilitator lingkungan. Menurut Nanang Haryono,¹⁷ hingga saat ini, telah terbentuk 402 fasilitator di Surabaya, dan pada tahun 2009 terbentuk Paguyuban Fasilitator Lingkungan Kota Surabaya. Paguyuban ini adalah organisasi sosial baru yang memiliki visi lingkungan dan mewadahi seluruh fasilitator lingkungan di Surabaya. Lebih jauh kata Haryono, paguyuban tersebut juga memiliki struktur dan kepengurusan mulai tingkat kota, wilayah, kecamatan hingga kelurahan.

¹⁶ [Lh.surabaya.go.id/web/wh/?c=main&m=lingperkotaan](http://lh.surabaya.go.id/web/wh/?c=main&m=lingperkotaan), diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.

¹⁷ http://nanang_haryono-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69597-Umum-URBAN%20GOVERNANCE%20AND%20ENVIRONMENTAL%20MANAGEMENT.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015

Setidaknya ada 11 orang fasilitator sebagai pengurus inti dan 35 orang pengurus paguyuban fasilitator lingkungan.

Menariknya, program ini digerakkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga yakni dengan jalan sebagai berikut; *Pertama*, Melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan melibatkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti, Bangun Pertiwi, Sahabat Lingkungan, Yayasan BLTKI, Puskota, Bina Mandiri dan Madani; *Kedua*, Melaksanakan kerjasama dengan komponen masyarakat, dalam hal ini Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); *Ketiga*, Menyelenggarakan lomba kebersihan dengan tema *Green and Clean*, Surabaya Berbunga dan lain-lain. Lomba dilakukan antar kecamatan atau antar kelurahan; *Keempat*, Melaksanakan operasi yustisi, yaitu dengan mendatangi langsung setiap wilayah; *Kelima*, Melakukan sosialisasi budaya bersih melalui kecamatan-kecamatan.¹⁸

Untuk mendukung mekanisme di atas, maka penataan kampung dan pengelolaan sampahnya dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus yang dirujuk dari konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*). Konsep ini sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (*Community Based Disaster Risk Reduction*) yang ditetapkan oleh *United Nations Development Program*¹⁹ sebagai berikut; *Pertama*, Mengadakan percontohan pengolahan sampah. Cara ini adalah menunjukkan kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah yang baik dan berhasil. Tujuannya adalah merubah *mind-set* terhadap sampah sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa sampah bisa dikelola dan mereka bisa melakukannya. *Kedua*, Membentuk kader lingkungan. Kader lingkungan diadakan dan dididik melalui program pelatihan yang diadakan DKP dan mitranya. Jumlah kader yang sudah ada pada kurang lebih 5000 orang. Tim Penggerak PKK Kota Surabaya bekerjasama dengan DKP secara rutin setiap minggu sekali menyelenggarakan kegiatan penyuluhan bagi warga kota di daerah Kebun Bibit. Produk yang diharapkan adalah kader lingkungan yang dapat melaksanakan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah di daerah tempat tinggalnya. *Ketiga*, Pendampingan terhadap warga. Kader lingkungan

¹⁸ Yulinah Trihadiningrum, *Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka Pencapaian Millenium Development Goals*, Makalah, Tanpa Tahun.

¹⁹ UNDP, *Panduan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas*, 2012.

yang sudah dibentuk memiliki tugas mendampingi warga dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. *Keempat*, Pengadaan prasarana kebersihan. DKP bersama LSM melakukan pembagian komposter rumah tangga (KRT), Keranjang Takakura, pengadaan gerobak sampah dan pembangunan rumah kompos. Pemberian fasilitas tersebut memperoleh support dari DKP dan sumber lain, seperti Dinas Pendidikan Nasional, PLN, dan sebagainya. *Kelima*, Pemantauan. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh para kader. Pemantauan dilakukan melalui kunjungan langsung, atau melalui telepon. Informasi yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi organisasi pemberdaya masyarakat, Lurah dan DKP untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. *Keenam*, Diseminasi kegiatan. Masyarakat melakukan diseminasi kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah, baik secara aktif maupun pasif: *Diseminasi aktif*: Masyarakat bersama kader lingkungan secara aktif memberikan penyuluhan dan pelatihan di daerah binaannya bagi masyarakat luar. Hal ini menjadikan daerah binaan tersebut menjadi pusat pembelajaran, sekaligus mengubah lokasi yang semula memiliki kecenderungan tertutup, menjadi terbuka bagi masyarakat luar. Termasuk dalam kategori diseminasi aktif adalah pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan di luar daerah binaan, dengan cara mengundang kelompok masyarakat yang membutuhkan. *Diseminasi pasif*. Kegiatan yang dilakukan di daerah binaan secara tidak langsung menjadi sumber inspirasi, motivasi dan semangat bagi orang-orang yang berkunjung untuk melaksanakan kegiatan yang sama di tempat tinggalnya.²⁰

Dengan demikian, program *Green and Clean* di atas sebetulnya telah menjadi gerakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan warga secara mandiri untuk mengatasi masalah lingkungan atau sampah. Upaya ini memungkinkan menjadi budaya lingkungan yang sehat yang digerakkan oleh masyarakat secara gotong royong, tanpa ada embel-embel kepentingan apapun (misalnya materi, dan sebagainya). Meskipun dalam operasionalnya, program ini dilakukan dengan stimulus tertentu seperti hadiah. Format perlombaan yang dibuat pemerintah Kota adalah bentuk stimulus itu, karena didalamnya ada hadiah atau penghargaan. Namun demikian, cara tersebut adalah bagian dari upaya unik untuk mengajak masyarakat. Secara substansial, program ini

²⁰ Yulinah Trihadiningrum, *Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka Pencapaian Millenium Development Goals*, Makalah, Tanpa Tahun.

juga memiliki nilai kebaikan untuk mengajak masyarakat menyelamatkan lingkungan menjadi lebih baik. Apalagi didalamnya ada spirit pemberdayaan yang menyentuh semua level masyarakat, mulai perempuan, hingga laki-laki, mulai yang tua, hingga yang masih muda, mulai siswa, hingga para sarjana. Semua dari mereka diajak untuk terlibat mengelola sampah di kampung-kampung, dimana mereka tinggal.

Secara faktual, sejak program ini diluncurkan, masyarakat ternyata menerimanya dengan baik yang ditunjukkan dengan spirit menjadikan program *Green and Clean* sebagai panggung untuk menunjukkan kampungnya sebagai yang terbaik (terbersih). Mereka mengelola sampahnya sendiri, dengan caranya sendiri, tanpa menghilangkannya substansi pengelolaan sampah yang telah ditentukan. Bank sampah menjadi sistem paten dimana mereka harus menjalankannya. Sistem ini memang dibuat dengan cara mengelola sampah secara kolektif dengan prinsip daur ulang. Metode ini dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomis dari sampah kering. Sementara masyarakat yang bertindak sebagai nasabah juga akan mendapat keuntungan. Mereka bisa punya tabungan yang bisa diambil sesuai kebutuhan.²¹ Selain itu, program *Green and Clean* telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk memoles kampungnya sebagai ruang publik yang bersih dan berbunga. Mereka menata sendiri kampungnya, dengan konsep asli (*genuine*) masyarakat. Hasilnya, semua kampung yang berpartisipasi dalam program ini memiliki suasana yang berbeda yang ditunjukkan dengan pemandangan kampung yang asri, bersih dan bebunga. Berbunga karena setiap jalan, setiap gang, bahkan setiap rumah ada tanaman bunga yang ditata sedemikian rupa oleh masyarakat secara sukarela.

Lebih jauh, program di atas juga telah diterima dengan antusiasme yang cukup tinggi. Ini ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam program ini. Setiap kompetisi dan penilaian dimulai, ada peningkatan dari jumlah peserta. Bahkan, berbagai inovasi, mulai program, alat pengelolaan sampah, dan metode reduksi sampah juga bermunculan. Antusiasme masyarakat di atas menjadi tolak ukur sukses tidaknya program ini, meskipun harus diakui, program *Green and Clean* tersebut tidak menjadi ikon kebersihan

²¹ Eka Utami, 2013, *Buku Panduan Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. h. ii.

kota yang singkat dan mudah, melainkan telah melalui proses yang panjang dan rumit.

Pelibatan masyarakat dalam program di atas jelas merupakan kunci, sebab masyarakat adalah subyek yang sangat dekat, bahkan berinteraksi langsung dengan sampah. Pelibatan masyarakat dalam program ini merupakan skenario utama program *Green and Clean*. Apalagi didalamnya ada semangat untuk membuat masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan sampah (*self reliance*). Kemandirian masyarakat diharapkan bisa melahirkan apa yang disebut dengan masyarakat tangguh bencana, dimana dimensi perilaku, mentalitas, dan pengetahuan yang cukup, serta kemampuan mengimplementasikan semua pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari ada di dalamnya.²²

Karena itu, bisa dimengerti bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah itu merupakan kebutuhan, karena persoalan sampah tidak mungkin diserahkan kepada pemerintah melalui “pasukan kuning”nya. Pelibatan masyarakat dimungkinkan akan membuat persoalan sampah sebagai salah satu determinan kerusakan lingkungan dapat teratasi. Apalagi ketika masyarakat sebagai subyek terberdayakan, mereka dengan sendirinya meminta, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi sendiri secara bersama-sama. Singkatnya, masyarakat yang demikian akan mampu membuat keputusan sendiri, dimana keputusan tersebut tak hanya ada di tangan elit, namun juga di tangan para warganya. Demikian juga tanggung jawab operasi dan pemeliharannya juga di tangan mereka sesuai dengan kesepakatan bersama.²³ Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa program *Green and Clean* yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya merupakan serangkaian tindakan dalam menangani masalah sampah yang secara langsung memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pendaurulangan sampah sehingga dapat mewujudkan kebersihan dan keberlanjutan lingkungan hidup secara mandiri.

Secara sosiologis, apa yang dilakukan di atas justru merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, sebagai bentuk pendekatan baru dalam upaya men-yelamatkan lingkungan. Dimana setiap prosesnya, ada nilai-nilai

²² Bhatnagar dan Williams dalam Akmad Sukardi, 2009, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, h. 57.

²³ Percik, 2009, h. 4.

kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan yang dimunculkan untuk melahirkan masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mandiri, swadaya, berkembang dan memiliki posisi tawar terhadap kekuatan-kekuatan internal maupun eksternal di segala bidang dan sektor kehidupan (Priyono dan Pranarka, 1996:44). Apalagi dalam konteks kebencanaan mereka umumnya menjadi korban jika ada bencana lingkungan, dan mereka pulalah yang paling awal harus melakukan sesuatu pasca bencana lingkungan terjadi.

Oleh sebab itu, dapat dimengerti bahwa program *green and clean* di atas lebih memiliki narasi emansipatoris²⁴ (pemberdayaan masyarakat) dari pada narasi program pemerintah pada umumnya. Program tersebut telah dijalankan dengan prinsip *community development* yang terencana dan terorganisir untuk mendidik masyarakat agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga diharapkan dapat mengatur dan mengatasi berbagai masalah yang akan timbul di lingkungannya.²⁵ Sebagai metode perubahan sosial yang terencana untuk mengatasi masalah sampah pada tingkat komunitas, program tersebut juga memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.²⁶ Singkatnya, program di atas perlu dikembangkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar memiliki kemampuan penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan untuk mengurangi resiko bencana lingkungan. Pada akhirnya masyarakat bisa diharapkan memiliki cara mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri jika bencana lingkungan terjadi.

Strategi Kota Surabaya Membangun Kelurahan Tangguh Bencana

Upaya mengurangi resiko bencana melalui program *green and clean* yang terintegrasi dengan pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas

²⁴ Narasi emansipatoris adalah nilai-nilai pengembangan masyarakat dengan menyadarkan, membuka pikiran dan memandirikan masyarakat. Emansipatoris adalah ciri teori kritis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Jerman, seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Bisa dibaca di Sindhunana (1982), Mansur Fakih (2009), Budi hardiman (2009)

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, 2005.

²⁶ Creig. *The Community Development Reader: History, Themes and Issues*. 2011.

di atas, sebetulnya merupakan strategi pembangunan kelurahan tangguh bencana. Ini dapat dilihat dari pengorganisasian, prinsip yang dibangun dan pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam program tersebut. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, terutama di BAB 3 Bagian A, maka program *green and clean* di atas bisa merupakan representasi dari peraturan tersebut karena Kelurahan ditempatkan sebagai area utama pengembangan masyarakat tangguh bencana. Secara substansial, program di atas juga telah menerapkan apa yang tertuang dalam peraturan tersebut, meskipun konsep yang dibangun dengan cara berbeda. Berbeda karena program *green and clean* dijalankan dengan strategi perlombaan kampung bersih dan kampung berbunga, namun memiliki semangat (jika tidak disebut tujuan) yang sama. Tujuan program *green and clean* ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang resiko bencana di perkotaan. Meskipun resiko yang dimaksud tak melulu soal gempa bumi dan tsunami, melainkan juga soal banjir bandang, udara kotor, pencemaran air dan sampah yang sering bersinggungan dengan masyarakat kota.

Dalam soal pengorganisasian misalnya, program *green and clean* telah diinisiasi oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Pengorganisasian kemudian diurusutamakan kepada komunitas RT/RW di setiap Kelurahan. Yang melakukan adalah para kader yang telah dibentuk sebelumnya. Para kader menjadi *Community Organizer* yang bertugas menjadi pendamping komunitas RT/RW. Mereka yang membangun komunikasi, memberi penyuluhan, pendampingan dan sebagainya. Segala kegiatan menyangkut program *green and clean* ini juga dikerjakan bersama dengan komunitas yang ada. Sepintas pengorganisasian ini sederhana, namun sebetulnya tidak semudah yang dibayangkan, sebab para kader harus berhadapan dengan berbagai persoalan kepentingan komunitas. Jika melihat prosesnya, maka pengorganisasian ini telah memiliki narasi (kecenderungan) yang sama dengan pola penganggulangan bencana berbasis komunitas, terutama tentang bagai-mana memilih komunitas, membangun hubungan dan memahami komunitas, analisis situasi dan kondisi, memobilisasi untuk memahami konteks, pengkajian resiko, perencanaan program dan menformulasikan rencana, pelaksanaan dan pemantauan program, penilaian

dan umpan balik, penyebarluasan dan pengintegrasian, serta pelebagaan dan konsultatif.²⁷

Hal lain yang penting dalam program ini adalah prinsip-prinsip yang di-bangun. Program *green and clean* Kota Surabaya telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Mereka sebagai subyek dan bukan sebagai objek program ini. Ada beberapa prinsip yang dijalankan program ini guna menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. *Pertama*, Urusan sampah adalah urusan bersama. Sampah di Kota Surabaya berusaha dipahami sebagai faktor utama terjadinya banjir. Karena itu, sampah tak bisa diserahkan kepada pemerintah melalui pasukan "kuningnya", melainkan harus dikelola secara bersama oleh seluruh komunitas. *Kedua*, Masyarakat menjadi pelaku utama. Urusan sampah dan kebersihan kampung kota, juga tak bisa dikerjakan pemerintah, ia harus melibatkan masyarakat, bahkan masyarakat harus menjadi pelaku utamanya dengan dukungan teknis dari pihak luar. Program *green and clean* Kota Surabaya telah melibatkan semua komponen masyarakat agar memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri dikemudian hari. *Ketiga*, Dilakukan secara partisipatoris. Program *green and clean* juga telah memberi ruang kepada masyarakat untuk saling mengisi dan berpendapat, apa yang mesti dilakukan dan dengan cara apa mereka melakukannya. Setiap komunitas diberi kesempatan untuk mengelola sendiri sampah dan kebersihan kampungnya. Mereka boleh berkreasi, membuat metode bahkan alatnya. *Keempat*, Pengarusutamaan gender. Program *green and clean* ini telah melibatkan banyak komunitas ibu-ibu sebagai pelaku utama. Pelibatan ini sebagai respon atas ketidakadilan gender secara *cross cutting issues*. Sehingga pelibatan komunitas ibu-ibu menjadi penting. Selain itu, juga untuk merespon ketentuan OKOSOB-PBB dan Konferensi Perempuan Internasional ke empat di Beijing tahun 1994, dan wajib dilaksanakan pada tahun 1997.²⁸

Terakhir adalah soal kemitraan. Harus diakui, program *green and clean* Kota Surabaya telah mengutamakan kemitraan atau kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa dan perusahaan swasta untuk melaksanakan program ini. Kemitraan yang dimaksud tak hanya menyelaraskan kebutuhan global, kebijakan nasional dan

²⁷ UNDP. *Panduan Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas*, 2012, h. 33.

²⁸ *Ibid.*, h. 44.

pemerintah lokal, namun juga untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program *green and clean*. Nanang Haryono²⁹ berpendapat bahwa, kemitraan *Government, Civil Society* dan *Private Sector* pada pengelolaan sampah Kota Surabaya telah menjadi variabel penting dalam manajemen pengelolaan lingkungan kota.

Kemitraan dalam program ini juga dirujuk dari apa yang telah berkembang sejak dekade 1990-an, ketika Indonesia ditimpa krisis ekonomi dan politik. Berbagai tokoh politik, masyarakat sipil dan dunia usaha, baik dalam, maupun luar negeri berkumpul merumuskan pembaruan dan kemajuan pembangunan Indonesia. Semangatnya adalah bagaimana cita-cita reformasi dapat dilaksanakan dengan menghindari kesalahan masa lalu dengan membangun masyarakat yang bertanggungjawab dan kerjasama.³⁰ Semangat itulah yang dicoba dipraktekkan dalam program *green and clean* ini sebagai bentuk pembangunan masyarakat, yang dilakukan lintas lembaga, mulai pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, yang kemudian dikenal dengan kemitraan.

Secara sederhana program *green and clean* di atas dibentuk melalui kerjasama untuk mencapai tujuan Surabaya hijau dan bersih, yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, keselarasan dan kemandirian.³¹ Kemitraan ini dilakukan untuk menciptakan hubungan strategik yang dirancang oleh pemerintah kota guna mencapai tujuan yang ditetapkan, manfaat bersama dan ketergantungan yang tinggi.³² Selain itu, kemitraan ini juga dinilai penting karena ada satu hal yang dikenal dengan jejaring (*network*), dimana di dalamnya ada hubungan antara pihak-pihak yang sengaja diajak berkolaborasi. Dalam konteks ini, kemitraan adalah membangun hubungan antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka beberapa prinsip dalam kemitraan dijalankan antara lain; saling perhatian, saling percaya, saling menghormati,

²⁹ http://nanang_haryono-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69597-Umum-URBAN%20GOVERNANCE%20AND%20ENVIRONMENTAL%20MANAGEMENT.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kemitraan_bagi_Pembaruan_Tata_Pemerintahan, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.

³¹ Sumarto, 2009, h. 116.

³² dalam Jane 2011, h. 193.

saling menyadari, ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, berpijak pada landasan yang sama, dan kesediaan untuk berkorban. Karena itu, secara sederhana, kemitraan pada program *green and clean* ini bisa dimaknai sebagai bentuk kerjasama antara otoritas publik (pemerintah) dengan sektor swasta untuk membiayai, membangun, merenovasi, mengelola, menjalankan, atau memelihara kegiatan *green and clean*.

Lebih jauh, kemitraan yang dibangun juga merupakan kemitraan strategis, yang dapat dilihat dari kesepakatan (*agreement*) Pemerintah (*government*), Masyarakat (*civil society*), dan Swasta (*private sector*) dalam program ini. Kesepakatan mereka tentu menyangkut program *green and clean*, yang implementasinya dapat dilihat dari kesuksesan program ini. Sebagaimana diketahui, program *green and clean* dirancang untuk membuat lingkungan Kota Surabaya menjadi hijau dan bersih. Tiga penentu kebijakan di atas menjalankan program tersebut melalui sebuah perlombaan yang dikenal dengan lomba kampung bersih. Semua kriteria penilaian juga dirumuskan yang terdiri dari penilai fisik kampung, meliputi prasarana pendukung lingkungan, irigasi, dan penghijauan. Penilaian pengelolaan sampah meliputi reduksi sampah, dan sistem pengelolaan sampah. Dan penilaian swadaya masyarakat yang meliputi fasilitator, kader lingkungan, aktifitas masyarakat, dan PKK. Penilaian lainnya meliputi administrasi, kesehatan dan habit atau kebiasaan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Strategi membangun kota tangguh bencana melalui program *green and clean* terintegrasi dengan pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas, merupakan metode baru untuk merwujudkan masyarakat yang tangguh bencana. Masyarakat yang demikian memungkinkan pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana di perkotaan bisa dilakukan. Selain karena memiliki relevansi historis juga karena menjadikan semua investasi dan langkah yang dilakukan menjadi efektif.

Program pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas yang dikemas dengan perlombaan kampung bersih dan hijau (*Green and Clean*) di Surabaya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang kuat. Hal tersebut

karena ia memiliki ciri khas didalamnya, *pertama*, proses pengorganisasi yang mengarusutamakan komunitas; *kedua*, prinsip yang dibangun, yang menempatkan sampah sebagai urusan bersama, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, dilakukan secara partisipatoris, dan pengarusutamaan gender; *ketiga*, kemitraan yang dibangun antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil. Sehingga program ini bisa disebut sebagai strategi pembangunan kota tangguh bencana. Yang lebih penting pula, program ini tak hanya mendorong masyarakat menjadi sadar, namun juga membangun komitmen bersama (masyarakat) menjaga lingkungan agar jauh dari bencana. Bencana yang dimaksud tak hanya soal tsunami dan tanah longsor, namun juga menyangkut masalah sampah, banjir, polusi udara dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Buku, Jurnal:

- Anwar, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan)*, Bandung: Alfabeta.
- Dick, HW, 2002, *Surabaya City of Work, A Socioeconomic History, 1900-2000*, United States of America: Acid Free Paper.
- Utami, Eka, 2013, *Buku Panduan Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*, Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.
- Fakih, Mansour, 2009, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press.
- Hardiman, Budi F., 2009, *Kritik Ideologi; Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.

- Jane, Orpha, *Analisis Potensi Partnership sebagai Moda untuk Meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Teknologi*, (2011). Vol.7, No. 2.
- John, Twigg, 2007, *Characteristics of A Disaster-Resilient Community*, London: Humanitarian Practice Network ODI.
- Maryono, Agus, 2010, "Membangun Budaya Mengerti Air (*Water Culture*) sebagai Basis dalam Membangun Demokrasi Air", *Makalah*.
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2010, *Executive Summary: Kajian tentang Model Community Development di Daerah*.
- Sutrisno, Bambang, 2013, "Langkah Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Sebuah Kajian Teoritis Yuridis Normatif", *Makalah*.
- Sumarto, Hetifah Sj., 2009, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sockanto, Soerjono, 1995, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sindhunata, 1982, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer Dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Jakarta: Gramedia.
- Trihadiningrum, Yulinah, (Tanpa Tahun), "Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota Dalam Rangka Pencapaian Millenium Development Goals", *Makalah*.
- UNDP, 2012, *Making Aceh Safer through Disaster Risk Reduction in Development: Panduan Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas*.

Website:

- www.news.bisnis.com, *Kerusakan Lingkungan Kota di Indonesia Makin Parah*, 21 September 2011.
- Ebasonline.blogdetik.com, Edi Basuki, *Pengembangan Masyarakat Sadar Bencana*, diakses pada 24 Januari 2014.
- Lh.surabaya.go.id/web/wh/?c=main&m=lingperkotaan, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.

http://nanang_haryono-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69597-Umum-URBAN%20GOVERNANCE%20AND%20ENVIRONMENTAL%20MANAGEMENT.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kemitraan_bagi_Pembaruan_Tata_Pemerintahan, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.

ABSTRAK

Perubahan iklim dapat mengakibatkan peningkatan suhu permukaan bumi yang dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

PENDAHULUAN DAN PERUMUTAN MASALAH

Pendekatan iklim berbasis komunitas adalah salah satu pendekatan yang telah berkembang di berbagai negara. Pendekatan ini menekankan pada peran aktif masyarakat dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim.

Salah satu tantangan utama dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.